



Padang Panjang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

# Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang



**TAHUN 2024**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*performance-base management*) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam sistem akuntabilitas terdapat beberapa komponen antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran/kinerja organisasi yang memerlukan upaya menyeluruh dari unit organisasi yang terkait. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwasanya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban formal bagi setiap Instansi Pemerintah guna mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja atau keberhasilan yang telah dicapai atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disepakati dan menyajikan informasi tentang rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dalam pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan urusan wajib pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

## **B. Maksud dan Tujuan :**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik, yang berisi informasi mengenai tercapainya sasaran, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

Adapun tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah :

1. Sebagai indikator dalam menilai keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi .
2. Sarana evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (feed back) dalam rangka penyempurnaan kinerja instansi dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan

## **C. Penjelasan Umum Organisasi**

### **C.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019, dan Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Terkait dengan tugas diatas, Dinas Kominfo Kota Padang Panjang mempunyai fungsi sebagai berikut ;

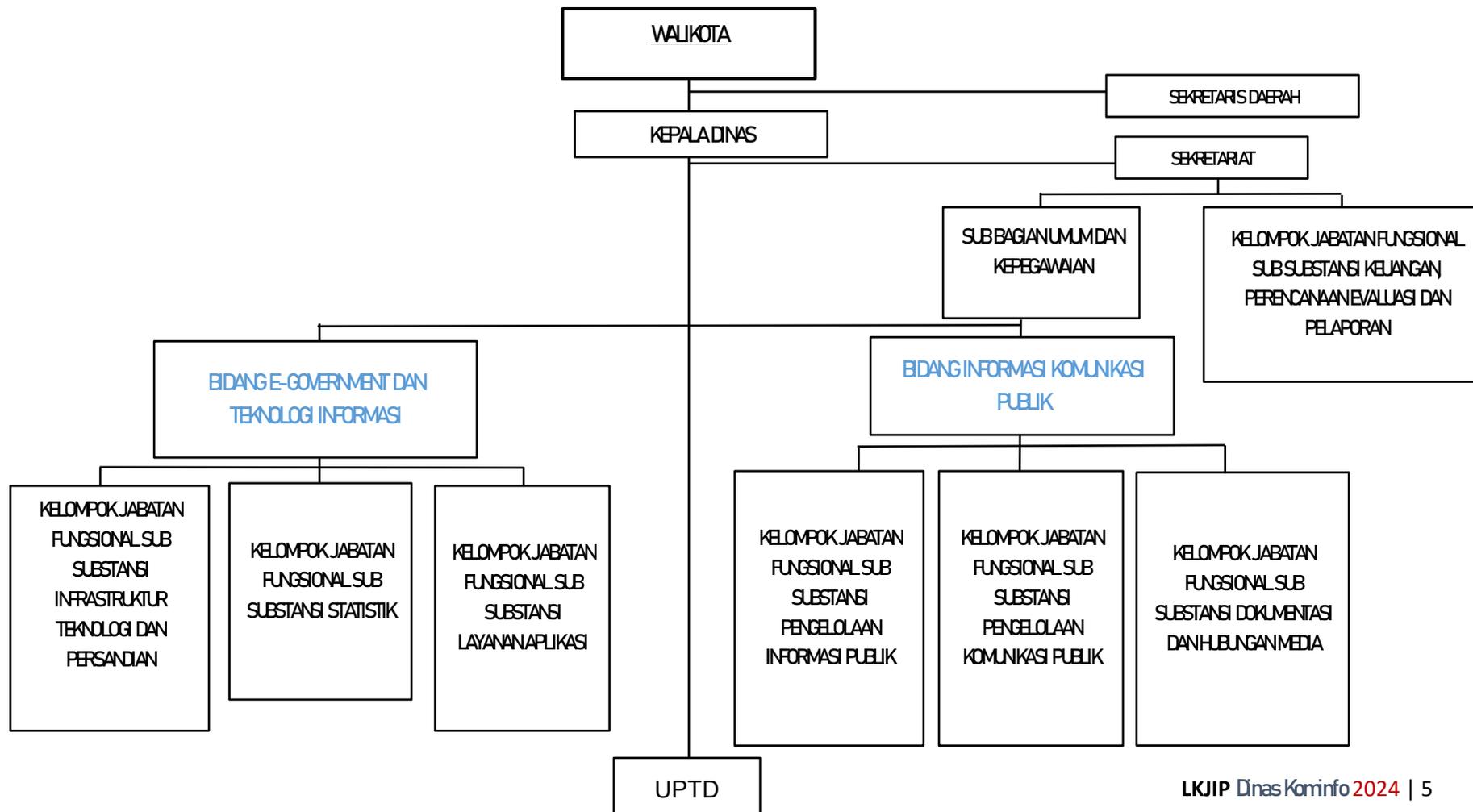
1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang E-Government dan Teknologi Informasi, terdiri dari:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik; dan
  - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi.
4. Bidang Informasi Komunikasi Publik terdiri dari:
  - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik;
  - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik; dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media;
5. UPTD.

**Gambar 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PADANG PANJANG**



Tugas pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  
2. **Sekretariat**, dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b. pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat terdiri dari :

- 1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengandaan, administrasi perjalanan dinas, ke rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - b) pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi surat masuk, surat keluar, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, sarana prasarana dan aset;
  - c) pengelolaan urusan kepegawaian meliputi mutasi, disiplin, kesejahteraan, data, dan peningkatan kapasitas pegawai; dan
  - d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta menyusun perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Penata usahaan keuangan;
- b) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
- c) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. **Bidang E-Government dan Teknologi Informasi**, yang dikepalai oleh Kepala Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang e-Government dan teknologi informasi dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang e-Government dan teknologi informasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang E-Government dan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Infrastruktur Teknologi dan Persandian;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Statistik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan Layanan Aplikasi; dan
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang E-Government dan Teknologi Informasi terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan program infrastruktur teknologi dan persandian dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan infrastruktur teknologi dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur Teknologi dan Persandian mempunyai fungsi:

- a) perencanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- b) pelaksanaan teknis infrastruktur teknologi dan persandian;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis infrastruktur teknologi dan persandian; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik yang dikepalai oleh Sub Koordinator Statistik** mempunyai tugas melaksanakan program Statistik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Statistik menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis statistik;
- b) pelaksanaan teknis statistik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis statistik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi yang dikepalai oleh Sub Koordinator Layanan Aplikasi** mempunyai tugas menyelenggarakan program Layanan Aplikasi dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Layanan Aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Layanan Aplikasi menyelenggarakan fungsi :

- a) perencanaan teknis Layanan Aplikasi;
- b) pelaksanaan teknis Layanan Aplikasi;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis Layanan Aplikasi; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. **Bidang Informasi Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang informasi komunikasi publik dalam arti merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi Komunikasi Publik mempunyai fungsi

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan informasi publik;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan pengelolaan komunikasi publik;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari:

- 1) **Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan informasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan informasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi teknis pengelolaan informasi publik; dan
- d) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan program pengelolaan komunikasi publik dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- b) pelaksanaan teknis pengelolaan komunikasi publik;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan pengelolaan komunikasi publik; dan
- d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media** yang dikepalai oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai tugas menyelenggarakan dokumentasi dan hubungan media dalam arti melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Dokumentasi dan Hubungan Media mempunyai fungsi :

- a) perencanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- b) pelaksanaan teknis dokumentasi dan hubungan media;
- c) pembuatan laporan dan evaluasi program dan kegiatan dokumentasi dan hubungan media; dan
- d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

### C.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

Berdasarkan kondisi tahun 2024, Sumber Daya Aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang berjumlah 63 orang terdiri dari 28 orang ASN dan 35 orang tenaga harian lepas (THL). Adapun gambaran statistik pegawai yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan jenis kepegawaian**

No.	Uraian	Jenis Kepegawaian		
		ASN	PPPK	THL
1	Golongan IV	4 orang	-	-
2	Golongan III	17 orang	1 orang	
3	Golongan II	3 orang	3 orang	
4	Non Golongan	-	-	35 orang
	Total Pegawai	63 orang		

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari keseluruhan pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh Pegawai THL sebanyak 52%, dan ASN (PNS dan PPPK) sebesar 48%. Hal ini dikarenakan banyaknya formasi jabatan teknis pada Dinas Kominfo yang belum diisi oleh ASN seperti tenaga jaringan dan tenaga liputan.

**Tabel 1.2**  
**Pegawai Dinas Kominfo berdasarkan Eselon/Jabatan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV.a	1 orang
4	Jabatan Fungsional Keahlian	12 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	11 orang

Dari Tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2024, komposisi pegawai pada Dinas Kominfo didominasi oleh jabatan fungsional baik keahlian sebesar 53% dan jabatan fungsional pelaksana sebesar 47%. Hal ini dikarenakan keberadaan pegawai yang berasal dari penyetaraan eselon IV dan pegawai PPPK yang langsung menempati jabatan fungsional keahlian.

**Tabel 1.3**  
**Pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No.	Uraian	Jumlah
1	Strata II	3 orang
2	Strata I	12 orang
3	Diploma III	8 orang
4	SLTA	3 orang

Latar belakang pegawai ASN Dinas Kominfo berdasarkan pendidikan didominasi Strata 1 atau Sarjana, selanjutnya adalah pendidikan Diploma III (teknis), Strata II, dan SLTA.

#### **D. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi OPD**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Penentuan Isu-isu strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang sesuai dengan hasil analisa permasalahan internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

1. Percepatan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah..
3. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang berkualitas.

#### **E. Sistematika Penyusunan LKjIP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan sistematika penulisan yang mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, sebagai berikut :

Pengantar

Daftar Isi

Bab I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Penjelasan Umum Organisasi
- D. Permasalahan utama yang dihadapi oleh OPD
- E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bab III : Akuntabilitas Kinerja 2024

- 1. Capaian Kinerja Organisasi
- 2. Realisasi Anggaran

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Dokumen perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih lanjut dikenal dengan Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan sekaligus dokumen perencanaan kinerja yang berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terkait hal ini, dalam perencanaan kinerja tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo Tahun 2024-2026.

#### **A. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan OPD adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan jabaran dari visi dan misi pembangunan, serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang mengacu RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 pada tujuan kedua **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** dan sasaran kelima **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Selanjutnya berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Definisi Operasional	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	3,00	3,10	3,20
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	2,60	2,80	3,00
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala indeks 1-5)	2,80	3,00	3,20

Sumber data Renstra Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional, setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada prioritas program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Perubahan Renstra 2024-2026, lebih lanjut Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Kota Padang Panjang**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan public dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	Sesuai dengan Permenpan Nomor 59 Tahun 2020, Indeks SPBE dihitung menggunakan lembar kerja pengukuran SPBE berdasarkan 47 indikator kinerja yang meliputi 4 domain yaitu kebijakan internal terkait SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. (berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala 1-5)	(jumlah OPD yang mempublikasikan data statistik melalui portal satu data)/(total jumlah OPD)*100%

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja sebagai bentuk komitmen atas kinerja yang terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja merupakan jabaran dari pencapaian tujuan dan sasaran OPD sebagaimana telah dimuat dalam Rencana Strategis. Penetapan target dalam Perjanjian Kinerja pada dasarnya sesuai dengan Rencana Strategis, namun untuk menjaga kesinambungan dan perbaikan kinerja dari capaian pada tahun sebelumnya dapat dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja.

Lebih lanjut ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja perubahan Dinas Kominfo tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	2,60	3,40
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan(Kualitas,Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2,80	2,80

	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,327,672,331	4,529,116,344	
2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,650,177,850	1,988,703,200	
3	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2,147,228,600	1,857,736,000	
4	Penyelenggaraan Statistik Sektor	30,020,000	7,068,000	
5	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	14,160,000	10,960,000	

Pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024, terdapat 1 (satu) indikator kinerja utama yang mengalami penyesuaian target sehingga berbeda dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Perubahan target ini dilakukan pada indikator sasaran strategis 1 dimana untuk indeks domain layanan SPBE target mengalami kenaikan dari 2,60 menjadi 3,40 dikarenakan capaian indikator ini pada tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 3,26. Sementara untuk indikator sasaran strategis Indeks Domain Pembangunan Statistik penetapan target sesuai dengan Renstra. Penyesuaian target kinerja ini dimaksudkan guna kesinambungan dan perbaikan kinerja selanjutnya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA 2024

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Analisis pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024.

Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata capaian indikator kinerja sasaran. Prediket nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Indikator Kinerja**

PRESENTASE	PREDIKET
<100%	Tidak tercapai
=100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapai kinerja yang diharapkan.

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang telah ditetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama untuk mendukung capaian 2 (dua) Sasaran Strategis OPD. Pencapaian kinerja untuk masing-masing Sasaran Strategis akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

### **A.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas.**

Pengukuran capaian kinerja untuk sasaran strategis 1, Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.1.1  
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Indeks Domain Layanan SPBE	3,40	3,82	112%

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

**Tabel 3.1.2**  
**Predikat Indeks SPBE**

Predikat Indeks SPBE		
No	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE dikelompokkan atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Dari rangkaian penilaian evaluasi SPBE Kota Padang Panjang yang dilakukan mulai Bulan Juli tahun 2024 melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen dan penilaian interview didapat hasil penilaian sebagaimana pada gambar dan tabel berikut.

**Tabel 3.1.3**  
**Hasil Penilaian Indeks SPBE Kota Padang Panjang Tahun 2024**

Nama Indeks	Bobot	Nilai 2024
<b>SPBE</b>		<b>3,16</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<b>3,60</b>
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	13%	3,60
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>	<b>2,90</b>
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	25%	2,25
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	10%	3,25
<i>Penyelenggara SPBE</i>	5%	3,00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>	<b>2,82</b>
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	12%	1,13
<i>Audit TIK</i>	4,5%	2,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>	<b>3,82</b>
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	27,5%	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	18%	4,00

*Sumber data : KemenpanRB 2024*

Indeks domain layanan SPBE merupakan salah satu dari 4 domain SPBE dengan bobot penilaian terbesar yakni 45,5 %. Pada Domain layanan SPBE terdiri dari penilaian terhadap penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Secara umum dari target kinerja sebesar 3,40 berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB untuk tahun 2024 hasil penilaian Kota Padang Panjang terealisasi **sebesar 3,82** pada predikat **Sangat Baik** atau dengan capaian kinerja 112%.

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan

Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, Layanan Kinerja Pegawai. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. Aplikasi TPP juga menunjukkan fungsi transaksi, validasi, kemajuan status persetujuan data, dan analitik data yang terintegrasi dengan aplikasi SIMAK, mencerminkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data dan layanan administrasi.

**Tabel 3.1.4**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Sasaran Srategis 1**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks domain layanan SPBE	3,55	3,26	92	3,40	3,82	112

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja untuk indikator indeks domain layanan SPBE dari tahun sebelumnya terjadi peningkatan nilai realisasi sebesar 117%.

**Tabel 3.1.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra**  
**Sasaran Srategis 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra	% Capaian
1.	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3,00	127

Target kinerja tahun 2024 ini ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan target Renstra, hal ini dikarenakan capaian kinerja untuk indikator ini pada tahun sebelumnya yang lebih dari target yang ditetapkan. Untuk nilai indeks SPBE pada akhir Renstra pada tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 3.00 sementara hasil penilaian tahun 2024 sebesar 3,82 artinya capaian kinerja sebesar 127%, dengan kata lain **telah melebihi target**.

**Tabel 3.1.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan standar nasional**  
**Sasaran Srategis 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Nasional	% Capaian
1.	Indeks domain layanan SPBE	3,82	3,78	101

Perbandingan capaian nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang dengan standar rata-rata nasional dalam hal ini sebesar 3,78 dapat disimpulkan bahwa indeks domain layanan SPBE kota Padang Panjang sudah berada diatas rata rata nasional.

**Tabel 3.1.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan Standar Kota**  
**Sasaran Srategis 1**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Indeks domain layanan SPBE	3,82	4.05	94

Sementara perbandingan capaian nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang dengan standar nilai yang didapat kota lain, dalam hal ini menggunakan rata rata realisasi nilai kota pada tahun 2024 sebesar 4.05 artinya perolehan nilai indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang masih berada dibawah nilai rata-rata kota yang ada di Indonesia.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatkan Implementasi Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas, didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) Program yakni:

1. Program Aplikasi Informatika
2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

**Tabel 3.1.8**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 1**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	3.4	3.82	112%	2,973,480,200	2,640,128,028	72,11%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE	3.6	2.9	81%	996,781,000	673,584,090	67,58%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kegiatan Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	2	2	100%	996,781,000	673,584,090	67,58%
	indeks aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	3.70	3.70	100%			
	indeks aspek layanan publik berbasis elektronik	3.7	4	108%			
Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan E- Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan pengawasan E- Government dalam penyelenggaraa n pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	100%	110,641,000	110,129,041	52,69%
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2	2	100%			
Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7	7	100%	1,735,370,000	1,716,565,460	98.92%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	1	100%			
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Nilai indeks KAMI</b>	<b>375</b>	<b>222</b>	<b>59%</b>	<b>10,960,000</b>	<b>9,825,250</b>	<b>89.65%</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelatihan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>10,960,000</b>	<b>9,825,250</b>	<b>89.65%</b>
	<b>Nilai Aspek Tata Kelola Keamanan Informasi</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>63%</b>			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%	10,960,000	9,825,250	89.65%
	Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksanakan	1	1	100%			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>	<b>227%</b>	<b>1,965,739,200</b>	<b>1,956,718,688</b>	<b>99.54%</b>

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Follower pada laman resmi kominfo padang panjang</b>	<b>27000</b>	<b>43237</b>	<b>160%</b>	<b>1,965,739,200</b>	<b>1,956,718,688</b>	<b>99.54%</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1	1	100%	306,107,000	305,444,806	92,61%
	Jumlah rilis berita mengenai informasi pembangunan daerah	1000	1150	115%			
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1	1	100%	159,129,000	156,261,382	86,67%
	Jumlah Konten Informasi Publik	850	681	80%			
	Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	0	0				
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	5	5	100%	1,491,017,200	1,485,526,500	72,55%
	Jumlah pertemuan jumpa pers	6	6	100%			
	Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	1	1	100%			

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1	2	200%	9,486,000	9,486,000	0.00%
		Jumlah Web KIM	2	2	100%		
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1	1	100%		

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika, dengan total pagu anggaran sebesar Rp1.846.011.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.826.694.501,- atau sebesar 95,54%. Indikator kinerja dari program ini adalah berupa indeks domain tata Kelola SPBE sebesar 3,60 dan terealisasi sebesar 2,90 atau dengan capaian kinerja 80,56 %.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.653.626.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.457.460.534,- atau sebesar 92,61%. Indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah:Jumlah aplikasi/ proses bisnis yang dikembangkan sebanyak 2 (dua) aplikasi dan terealisasi 2 (dua aplikasi) atau capaian kinerja 100%, Indeks Aspek Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan target nilai 3,70 dapat terealisasi sesuai target sebesar 3,70 atau dengan capaian kinerja 100% dan Indeks Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan target nilai 3,70 dapat terealisasi melebihi target sebesar 4.00 atau dengan capaian kinerja 108%.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.398.239.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.956.718.688 atau sebesar 81,59%. Indikator kinerja program ini adalah Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44% dan terealisasi sebesar 100% atau dengan capaian 227%.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.2.398.239.200,- dan terealisasi sebesar Rp.1.956.718.688 atau sebesar 81,59%. Hasil dari kegiatan ini adalah jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (Instagram) sebanyak 27.000 followers dan terealisasi sebanyak 43.237 followers atau dengan capaian 160%.

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.825.250,- atau sebesar 89.65%. Adapun indikator kinerja untuk program ini adalah indeks KAMI dengan nilai sebesar 375 dan dapat terealisasi sebesar 222 Atau dengan capaian kinerja 59,2 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 10.960.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.825.250,- atau sebesar 89.65%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 (satu) kegiatan atau capaian 100%, Nilai aspek Tata Kelola Keamanan Informasi dengan nilai 11 dan teralisasi sebesar 33 atau dengan capaian kinerja 59%.

Secara umum rata-rata capaian untuk masing-masing program cukup baik, namun masih ada beberapa indikator yang belum teralisasi sesuai target terkait dengan indeks tata Kelola SPBE dan indeks keamanan informasi yang capaiannya masih dibawah target

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis, maka dapat disimpulkan bahwa terkait peningkatan capaian indeks domain layanan SPBE Kota Padang Panjang terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Sudah adanya Kebijakan Internal tata Kelola SPBE, antara lain Kebijakan Internal Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Jaringan
2. Pemerintah Kota Padang Panjang telah memanfaatkan berbagai aplikasi dan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif. Aplikasi seperti KRISNA, SIPD, SPSE, SIMAK, MyASN, dan Srikandi telah digunakan secara optimal, dengan kolaborasi antar-layanan elektronik yang mendukung integrasi dan efisiensi. yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Padang Panjang
3. Menguatnya koordinasi dan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengkomunikasikan /mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja.

Sementara itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan untuk mendapatkan capaian kinerja yang lebih baik lagi, diantaranya :

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan terkait tatakelola pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Perlu penambahan/pengadaan personil, dan peningkatan kapasitas SDM TI dan persandian.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk kebutuhan penyediaan infrastruktur TI dan pengamanan informasi.

## **A.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)**

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel berikut:

**Tabel 3.2.1**  
**Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS**

<b>Tingkat Kematangan</b> (1)	<b>Kriteria</b> (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 3.2.2**  
**Predikat Indeks Hasil EPSS**

<b>Nilai</b> (1)	<b>Predikat</b> (2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.

→ DOMAIN	ASPEK & INDIKATOR									
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi dan/atau Data Induk
	Standar Data Statistik			Metadata Statistik			Interoperabilitas Data			Kode Referensi
Kualitas Data	Relevansi		Akurasi	Aktualitas & Ketepatan Waktu		Aksesibilitas			Keterbandingan & Konsistensi	
	Relevansi Data	Identifikasi Kebutuhan	Akurasi Data	Aktualitas Data	Ketepatan Diseminasi	Ketersediaan Data	Akses Media Penyebarluasan	Format Data	Keterbandingan Data	Konsistensi Statistik
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data			Pengumpulan Data		Pemeriksaan Data		Penyebarluasan Data		
	Pendefinisian Kebutuhan	Desain Statistik	Penyiapan Instrumen	Proses Pengumpulan/Akuisisi		Pengolahan	Analisis	Diseminasi		
Kelembagaan	Profesionalitas				SDM yang Memadai dan Kapabel		Pengorganisasian Statistik			
	Transparansi Informasi	Netralitas dan Objektivitas	Kualitas Data	Konfidensialitas Data	SDM Statistik	SDM Manajemen Data	Kolaborasi Kegiatan Statistik	Forum SDI	Kolaborasi Pembina Statistik	Tugas Walidata
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik			Pengelolaan Kegiatan Statistik				Penguatan SSN Berkelanjutan		
	Penggunaan Statistik Dasar	Penggunaan Statistik Sektoral	Sosialisasi dan Literasi Data	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik				Perencanaan Pembangunan Statistik	Penyebarluasan Data	Pemanfaatan Big Data

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kota Padang Panjang adalah:

- a. Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Kota Padang Panjang Tahun 2023,
- b. Survey Evaluasi Implementasi Smart City Kota Padang Panjang Tahun 2023

Dari penilaian tersebut didapatkan hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Padang Panjang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

**Tabel 3.2.3**  
**Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Domain**

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	1,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,87
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,17
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,18
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,45
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>2,35</b>	<b>1,94</b>

**Tabel 3.2.4**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024**  
**Sasaran Strategis 2**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2.80	1.94	69,28%

Berdasarkan hasil EPSS Dari penilaian tersebut didapatkan hasil Indeks Pembangunan Statistik Kota Padang Panjang sebesar 1,94 atau masuk kategori **cukup**. Dibandingkan target pada tahun 2024, capaian untuk sasaran strategis ini sebesar 69,28% atau **belum mencapai target** Perjanjian Kinerja.

Perbandingan realisasi capaian kinerja dari tahun sebelumnya dan dengan target capaian yang ada dalam Rencana Strategis Dinas Kominfo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Sasaran Srategis 2**

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
2.	Indeks Domain Pembangunan Statistik	na	2,61	na	2,80	1,94	69,28

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja untuk indikator indeks pembangunan statistik lebih rendah dari perolehan tahun sebelumnya.

**Tabel 3.2.6**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dan target akhir Renstra**  
**Sasaran Srategis 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian
2.	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	3,20	60,62

Dibandingkan dengan target akhir Renstra pada akhir tahun 2026, maka realisasi kinerja untuk indikator ini baru mencapai 60,62% dari target akhir Renstra.

**Tabel 3.2.7**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional**  
**Sasaran Srategis 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	Standar Nasional	Capaian
1.	Indeks Domain Pembangunan Statistik	1,94	2,35	82,55%

Perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dibanding dengan standar rata-rata Nasional sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 82,55% atau dibawah standar nasional.

**Tabel 3.2.8**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2024 dengan standar kota**  
**Sasaran Srategis 2**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-rata Kota	% Capaian
1.	Indeks domain layanan SPBE	1,94	2,51	77,29%

Untuk perbandingan realisasi kinerja indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan standar rata-rata nilai perolehan Kota yang ada di Indonesia adalah sebesar 2,35 diperoleh capaian sebesar 77,29% atau dibawah standar nilai rata-rata Kota.

Capaian kinerja untuk sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan), didukung oleh pelaksanaan . Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

**Tabel 3.2.8**  
**Realisasi Kinerja Program Pendukung Sasaran Srategis 2**

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	2.8	1.94	69%	7,608,000	6,088,750	80.03%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA TRIWULAN IV			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase data statistik sektoral yang berkualitas</b>	<b>35%</b>	<b>71%</b>	<b>203%</b>	<b>7,608,000</b>	<b>6,088,750</b>	<b>80.03%</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>	<b>7,608,000</b>	<b>6,088,750</b>	<b>80.03%</b>
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase metadada statistik sektoral yang berkualitas	35%	35%	100%	7,608,000	6,088,750	80.03%
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1	1	100%			
	Jumlah dokumen statistik sektoral yang diadakan	3	3	100%			

Secara umum realisasi kinerja program pendukung untuk sasaran ini sebagaimana terlihat pada tabel diatas, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 7.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.088.750,- atau sebesar 80,03%. Indikator kinerja program ini adalah persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebesar 35% dan terealisasi sebesar 71% atau dengan capaian kinerja 202%.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan total pagu anggaran sebesar Rp.7.608.000,- dan terealisasi sebesar Rp.6.088.750,- atau sebesar 80,03%. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen dan

teralisasi sebanyak 3 (tiga) dokumen atau dengan capaian kinerja 100% dan Persentase metadata statistic sektoral yang berkualitas sebanyak 35% dan terealisasi sebanyak 35%. atau dengan capaian kinerja 100%.

Dari gambaran, perbandingan dan analisa atas capaian kinerja indikator sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan Satu Data dalam penyelenggaraan pemerintahan (Kualitas, Pengelolaan dan Pemanfaatan), maka dapat disimpulkan bahwa terkait pencapaian indeks pembangunan statistik yang belum sesuai dengan target dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Penerapan statistik sektoral di Kota Padang Panjang, khususnya pada OPD di lingkup pemerintah Kota Padang Panjang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan statistic sektoral.

Sebagai rekomendasi agar capaian kinerja sasaran strategis ini dapat terlaksana sesuai dengan target ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

1. Perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang kaidah dari semua aspek penyelenggaraan statistic sektoral.
2. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih inten terhadap penyelenggaraan statistik sektoral melalui Forum Satu Data Kota Padang Panjang
3. Perlu adanya SDM yang memadai dan kapabel dibidang statistic

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi pencapaian anggaran kinerja keuangan pada tahun 2024 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar terkait Urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk melaksanakan masing masing urusan itu dialokasikan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar Rp. 8.824.813.783,- dalam bentuk pelaksanaan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu ) sub kegiatan selama tahun 2024. Adapun program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2024 secara fisik terealisasi sebesar 99,63 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.8.311.789.0728 atau mencapai 94,19% .

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran**

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>8,956,870,789</b>	<b>8,649,692,500</b>	<b>94,19%</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>4,562,532,883</b>	<b>4,405,973,896</b>	<b>97%</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3,703,106,583</b>	<b>3,568,305,179</b>	<b>96%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3,703,106,583	3,568,305,179	96%
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14,000,000	14,000,000	100%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>289,035,300</b>	<b>287,591,257</b>	<b>100%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	8,136,500	7,766,000	95%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33,997,000	33,164,500	98%
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4,001,800	3,940,200	98%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242,900,000	242,720,557	100%
<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>42,365,000</b>	<b>34,250,000</b>	<b>81%</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42,365,000	34,250,000	81%
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>307,092,000</b>	<b>296,189,260</b>	<b>96%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107,132,000	99,587,000	93%
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	199,960,000	196,602,260	98%
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>206,934,000</b>	<b>205,638,200</b>	<b>99%</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166,056,000	165,850,200	100%
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26,908,000	26,658,000	99%
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13,970,000	13,130,000	94%
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2,398,239,200</b>	<b>1,956,718,688</b>	<b>82%</b>
<b>G</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,398,239,200</b>	<b>1,956,718,688</b>	<b>82%</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	306,107,000	305,444,806	100%

NO	PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	159,129,000	156,261,382	98%
3	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	1,491,017,200	1,485,526,500	100%
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	9,486,000	9,486,000	100%
5	Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik	432,500,000	106,477,000	25%
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>1,846,011,000</b>	<b>1,826,694,501</b>	<b>99%</b>
H	<b>Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1,846,011,000</b>	<b>1,826,694,501</b>	<b>99%</b>
1	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	110,641,000	110,129,041	100%
2	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1,735,370,000	1,716,565,460	99%
	<b>URUSAN STATISTIK</b>	<b>7,608,000</b>	<b>1,039,500</b>	<b>14%</b>
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>7,608,000</b>	<b>1,039,500</b>	<b>14%</b>
I	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>7,608,000</b>	<b>1,039,500</b>	<b>14%</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	7,608,000	6,088,750	80%
	<b>URUSAN PERSANDIAN</b>	<b>10,960,000</b>	<b>9,825,250</b>	<b>90%</b>
V	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>10,960,000</b>	<b>9,825,250</b>	<b>90%</b>
J	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>10,960,000</b>	<b>9,825,250</b>	<b>90%</b>
1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	10,960,000	9,825,250	90%
		<b>Rp. 8.824.813.783</b>	<b>Rp.8.311.789.072</b>	<b>94,19%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

LKJIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas asas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan sekaligus memberikan gambaran dan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisa, diperoleh gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pencapaian sasaran strategis melalui 2 (Dua) indikator kinerja utama pada tahun 2024 belum seluruhnya sesuai target, dimana pada satu sasaran terkait dengan indikator indeks domain layanan SPBE dapat terealisasi melebihi target dengan capaian 112% sedangkan pada sasaran strategis dengan indikator indeks pembangunan statistic belum terealisasi sesuai target dengan capaian hanya sebesar 69,28 % jika dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renstra Kominfo tahun 2024-2026 seluruhnya sudah mencapai target, namun jika dibandingkan dengan target sesuai dengan perjanjian kinerja dari (Dua) sasaran strategis Dua (Dua) indikator sudah mencapai bahkan melampaui target.
2. Terkait dengan capaian program, dari pelaksanaan 5 (lima) program, 8 (delapan) kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan selama tahun 2024 rata-rata terealisasi dengan baik. Untuk pencapaian program dari 5 (lima) program hanya 1 (satu) program yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang memiliki capaian cukup terkait dengan hasil penilaian indeks Keamanan Informasi (KAMI) yang rendah dikarenakan keterbatasan kebijakan/regulasi dan ketersediaan infrastruktur terkait pengamanan informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Padang Panjang. Sementara untuk 4 (empat) program lainnya dapat terealisasi sesuai target.

3. Tingkat Realisasi anggaran pada tahun 2024 cukup tinggi, dimana dari anggaran perubahan sebesar Rp. 8.824.813.783,- terealisasi sebesar Rp.8.311.789.072,- atau mencapai 94,19%. Adapun sisa lebih perhitungan anggaran berasal dari sisa didominasi adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan dan sisa belanja pemeliharaan infrastruktur.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, masih terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi untuk ditindaklanjuti guna perbaikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang di tahun selanjutnya, diantaranya:

1. Perlunya komitmen, kolaborasi, koordinasi dan konsistensi dalam perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan SPBE sebagai program strategis Nasional dan Daerah antara pimpinan dan stakeholder terkait.
2. Perlunya penyusunan regulasi dan dokumen perencanaan strategis terkait tata kelola SPBE khususnya penyusunan dokumen masterplan Smart City dan Arsitektur SPBE.
3. Perlunya penyusunan regulasi/kebijakan terkait tatakelola pengamanan informasi pemerintah daerah.
4. Perlu penambahan/pengadaan personil, dan peningkatan kapasitas SDM TI dan persandian.
5. Perlu alokasi anggaran yang cukup untuk kebutuhan penyediaan infrastruktur TI dan pengamanan informasi.
6. Perlu disusun pedoman penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang kaidah dari semua aspek penyelenggaraan statistic sektoral.
7. Perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang lebih inten terhadap penyelenggaraan statistik sectoral melalui Forum Satu Data Kota Padang Panjang
8. Perlu tersedianya SDM yang memadai dan kapabel dibidang statistic

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan dari gambaran pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang selama tahun 2024, beberapa hal direkomendasikan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang mendatang.

Padang Panjang, Desember 2024

**Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Padang Panjang**



The image shows a circular official stamp of the Padang Panjang City Government. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG'. The inner ring contains 'DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA'. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

**Drs. AMPERA, SH.M.Si  
NIP. 196810703 198203 1 00**